

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN PROBLEM INTERMEDIASI

Abdul Manap Pulungan

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

Ahmad Erani Yustika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya
Jl. MT.Haryono No.165 Malang, 65145.

Abstract

After economy crisis in 1997/1998, gradually banking intermediation had held its function again although until now it was still far from what it was hoped. Some banks had already fulfilled the regulation of Indonesia Bank to give credit more than 78% (LDR), but there were still many banks that had not fulfilled the regulation. The factors of high interest rate, banking efficiency, and economy infrastructure availability were considered as the factors that impeded the banking intermediation function. Not all those problems belonged to Indonesia Bank. However, some of them were the homework for government (like economy infrastructure supplying). Thus, cooperation between Indonesia Bank and government was something that had to be done to finish the problem. Besides, there were other problems that needed to be paid attention in bank performance that was gradually better. They were: (1) banking credit which was farther from real sector (agriculture and industry); (2) credit which was not evenly distributed in all areas (3) savings dominated by short term fund; (4) banking structure which tended oligopoly; and (5) most savings or fixed deposits which were dominated by few account owners.

Key words: *intermediation function, credit, interest rate, real sector, Indonesia Bank*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pasca krisis 2008, sektor perbankan diterpa banyak berita tidak sedap. Kasus *bailout* Bank Century yang sampai sekarang belum tuntas masalahnya, merupakan salah satu puncak gurita masalah yang mengikat sektor perbankan. Di luar soal itu, sektor perbankan dituding sebagai penyebab tidak optimalnya kinerja pembangunan ekonomi nasional, karena tingginya tingkat suku bunga (kredit), *net interest margin* (NIM) yang besar (paling tinggi di Asia Tenggara), tingkat penyaluran kredit yang relatif rendah (*loan to deposit ratio*/LDR), dan efi-

siensi yang rendah. Ragam persoalan itu tentu berkebalikan dengan kinerja sektor perbankan sendiri, yang dari waktu ke waktu justru membukukan keuntungan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah soal peranan intermediasi perbankan, khususnya terhadap sektor riil, yang masih jauh dari titik optimal. Risalah ini ingin mendeskripsikan perkembangan sektor perbankan terkini, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi, dan mencoba mencari alternatif jalan keluar secepatnya agar peran intermediasi perbankan menjadi lebih baik.

Korespondensi dengan Penulis:

Ahmad Erani Yustika: Telp. +62 341 418 871

E-mail: erani@fe.unibraw.ac.id; erani73@yahoo.com

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam berbagai teori pertumbuhan ekonomi telah diungkap bagaimana peranan sektor keuangan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa teori yang lazim menjadi rujukan di antaranya dikemukakan oleh Harrod-Domar maupun Solow. Teori pertumbuhan Solow menjelaskan terdapat tiga faktor utama yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu modal (K), tenaga kerja (L), dan teknologi (T). Peranan sektor keuangan penting guna penghimpunan modal. Mekanismenya melalui bekerjanya fungsi intermediasi keuangan, yaitu mempertemukan antara pihak defisit dana (*deficit spending unit*) dan pihak surplus dana (*surplus spending unit*).

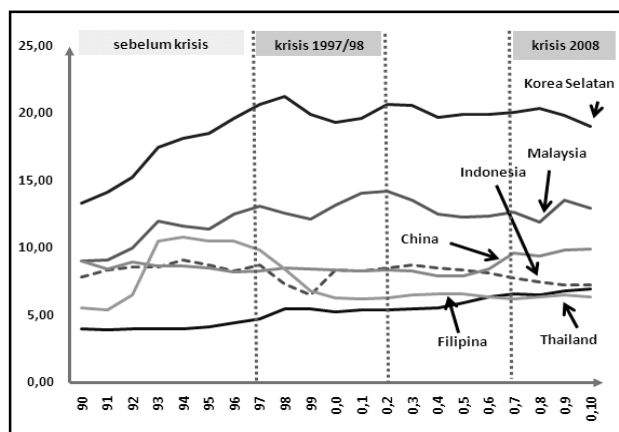
Kajian tentang peranan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh sejumlah kalangan. Levine & King (1993) melihat adanya hubungan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 80 negara selama 1960-1989. Mereka menjelaskan sektor keuangan dalam mengakumulasi tabungan dan kemudian mentransfernya dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif. Implikasi lebih lanjut tergambar dari pergerakan output perekonomian. Studi lain dilakukan oleh Bonin & Wachtel (2003) dan Demirguc-Kun & Levine (2008) yang menyimpulkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem keuangan yang lebih baik (*better-developed*) cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat.

Peranan sektor keuangan terhadap pembentukan PDB dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

Pangsa Sektor Keuangan terhadap PDB

Data *Asian Development Bank/ADB* (2011) merinci kontribusi sektor keuangan terhadap PDB beberapa negara selama 1990-2010. Dari rekam tersebut terlihat bagaimana pengaruh krisis 1997/98

terhadap pangsa sektor keuangan di Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, China, Filipina dan Thailand. Pada 1990, pangsa sektor keuangan di Indonesia baru 7,78 persen menjadi 7,31 persen pada 1998. Pada 2010, rasio tersebut hanya pada level 7,21 persen. Selama 1990-2010 terjadi penurunan pangsa sektor keuangan di Indonesia sekitar 0,57 persen.



Grafik 1. Perkembangan Rasio PDB Sektor Keuangan terhadap PDB Total

Sumber: Diolah dari *Asian Development Bank*, 2011

Pangsa PDB sektor keuangan di Malaysia mencapai 8,99 persen per 1990 menjadi 12,56 persen pada 1998, sedangkan pada 2010 rasio tersebut mencapai 12,92 persen. Selama periode 1990-2010 rasio sektor keuangan terhadap PDB Malaysia naik 3,92 persen. Rasio sektor keuangan di Korea Selatan dan China masing-masing 13,26 persen dan 9 persen, sedangkan pada 2010 naik 5,77 persen dan 0,9 persen. Dua negara dengan rasio sektor keuangan terhadap PDB yang lebih rendah dari Indonesia adalah Filipina dan Thailand sebesar 3,95 persen dan 5,52 persen pada 1990; Sedangkan pada 2010 menjadi 6,91 persen dan 6,32 persen. Selama periode tersebut, rasio sektor keuangan pada dua negara tersebut masing-masing naik 2,96 persen dan 0,8 persen (Grafik 1).

Dalam kajian Agung, dkk. (2001) dijelaskan fenomena yang terjadi saat krisis moneter meng-

gambarkan adanya penurunan kinerja kredit perbankan sebagai sektor yang memiliki peranan yang paling dominan dalam perekonomian Indonesia. Setelah krisis, terjadi penurunan penyaluran kredit karena minimnya permintaan dan penawaran kredit (*credit crunch*). Lebih lanjut kajian tersebut menggambarkan kecenderungan bank dalam menghindari risiko (*risk averse*) karena potensi kredit macet (*Non Performing Loans/NPL*) masih tinggi. Sementara dari sisi dunia usaha digambarkan adanya proses penyesuaian kondisi internal untuk memperbaiki kondisi keuangan setelah krisis.

Rasio Jumlah Uang Beredar M2 terhadap PDB

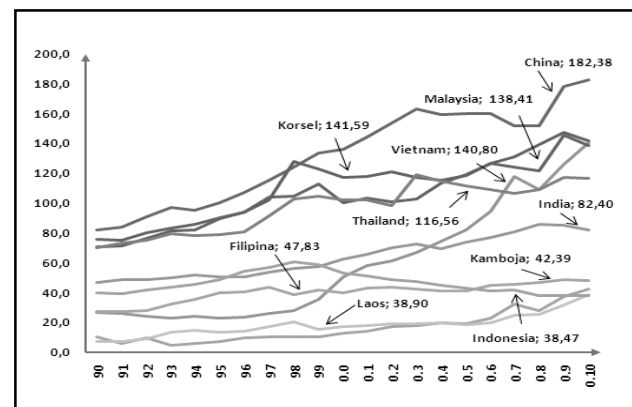
Jumlah uang beredar M2 merupakan jumlah uang dalam arti luas, yaitu uang kartal dan simpanan giro (M1) ditambah dengan uang kuasi dan surat berharga selain saham. Uang kuasi merupakan surat atau sertifikat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Artinya, lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam pembentukan M2 sebagai sumber dana pembangunan. Dengan demikian semakin besar jumlah M2 akan mendorong meningkatnya *financial deepening*, yaitu penghimpunan dana pembangunan yang bersumber dari sektor keuangan.

Juoro (1993) menjelaskan *financial deepening* tergambar dari rasio antara M2 dengan PDB. Dalam cakupan lebih rinci, Beck *et al.* (1999) menjelaskan dua acuan tentang ukuran kedalaman sektor keuangan suatu negara, yaitu: (1) perbandingan antara penyaluran kredit pada sektor swasta melalui deposito bank terhadap PDB; dan (2) perbandingan antara penyaluran kredit pada sektor swasta melalui deposito lembaga keuangan nonbank terhadap PDB.

Kajian Apergis, *et al.* (2007) menghasilkan kesimpulan penting tentang peranan *financial deepening* terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Studi dilakukan pada dua kategori negara, yaitu OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan Non-OECD. Variabel

liquid liabilities of the financial system (LL), *bank credit (BC)* dan kredit sektor swasta (*private sector credit/PC*) sebagai indikator *financial deepening* menunjukkan hasil signifikan dengan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan peranan sektor keuangan secara nyata berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, indikator pendalaman sektor keuangan di Indonesia relatif lamban. Pertumbuhan PDB tidak diikuti oleh dengan perkembangan ketersediaan dana dalam perekonomian. Sampai 2011 rasio M2 terhadap PDB Indonesia hanya 39,59 persen, sedikit naik dari 38,07 persen tahun sebelumnya. Level tersebut lebih rendah dari Kamboja dan Laos masing-masing 42,39 persen dan 38,90 persen per 2010. Sementara itu, indikator kedalaman sektor keuangan ini di China mencapai 182,38 persen; Korsel 141,59 persen; Vietnam 140,80 persen; Malaysia 138,41 persen; Thailand 116,56 persen; India 82,40 persen; dan 47,83 persen per 2010. Krisis 1997/1998 secara nyata memberikan tekanan besar terhadap ketersediaan dana pembangunan di Indonesia. Per 1997 rasio M2 terhadap PDB masih 56,66 persen dan masih meningkat pada kisaran 63 persen hingga 2000. Setelah 2000 rasio ini terus menurun (Grafik 2).



Grafik 2. Perkembangan Rasio M2 terhadap PDB

Sumber: Diolah dari ADB, 2011.
India menggunakan data M3/PDB

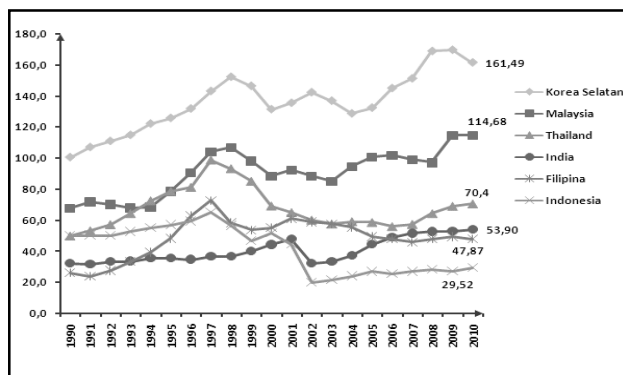
Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

Rasio Kredit terhadap PDB dan Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga

Dalam model pertumbuhan Solow yang dijelaskan sebelumnya, peranan sektor keuangan dalam mengakumulasi modal tergambar dari penghimpunan tabungan dan kemudian menyalurkannya dalam mekanisme kredit. Oleh sebab itulah kredit memiliki peran penting bagi suatu perekonomian. Terdapat dua indikator yang dapat menggambarkan peranan kredit terhadap perekonomian, yaitu (i) rasio kredit terhadap PDB; dan (ii) rasio kredit terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK atau *Loan to Deposit Ratio/LDR*.

Di Indonesia, sebagian besar kredit masih bersumber dari sektor perbankan. Sampai 2011 rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya 29,62 persen, naik dari 28,04 persen tahun sebelumnya. Krisis 1997/1998 kembali menjadi penyebab penurunan rasio kredit terhadap PDB nasional. Sejak 1999, indikator ini hanya 22,16 persen, bahkan mencapai level terendah 21,87 persen. Sejak 1999-2011, rasio kredit terhadap PDB belum pernah menyentuh level 30 persen.



Grafik 3. Perkembangan Rasio Kredit terhadap PDB
Sumber: Diolah dari ADB, 2011

LDR perbankan di Indonesia hingga 2011 baru 78,77 persen, naik dari 75,92 persen. LDR perbankan menurun signifikan sejak krisis 1997/98. Pada 1998, LDR masih pada kisaran 84,99 persen

menurun menjadi 35,99 persen pada 1999. Sejak 2000-2010, LDR perbankan berkisar antara 37-75 persen. Beberapa data LDR negara lain per 2010 yang dapat ditampilkan adalah sebagai berikut: Thailand (95,26 persen); Filipina (112,61 persen); Malaysia (141,06 persen); dan Korea Selatan (87,67 persen) (Grafik 3).

PARADOKS STRUKTUR EKONOMI, STRUKTUR KETENAGAKERJAAN, DAN KREDIT

Struktur ekonomi Indonesia dapat dikatakan rapuh karena peranan sektor *tradeable* terhadap PDB mulai berkurang. Pada 2011, peranan sektor *tradeable* (sektor padat karya) terhadap PDB adalah 50,94 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan yang menjadi kontributor utama, masing-masing tinggal 14,72 persen dan 24,28 persen. Kontribusi sektor *nontradeable* adalah 49,06 persen. Penyumbang utama sektor *nontradeable* adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sekitar 13,76 persen. Padahal, sektor *tradeable* adalah sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu menyerap di atas 50 persen dari tenaga kerja di Indonesia, terutama pada sektor pertanian 35,86 persen dan industri pengolahan 13,26 persen. Pada sektor *nontradeable*, penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,34 persen.

Lemahnya kinerja sektor *tradeable* tak terlepas dari adanya ketimpangan penyaluran kredit oleh sektor perbankan. Tabel 1 menunjukkan penyaluran kredit justru terkonsentrasi pada sektor *nontradeable*, mencapai 75,13 persen. Sektor jasa-jasa dan sektor lain-lain memperoleh alokasi hingga 46,87 persen. Sektor lainnya yang memiliki penyerapan kredit tertinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 18,43 persen. Sektor *nontradeable* hanya memperoleh 24,87 persen dari total kredit perbankan. Rinciannya adalah sektor pertanian memperoleh kucuran kredit 5,21 persen, pertambangan dan penggalian 3,99 persen dan industri pengolahan 15,66 persen.

Di sisi lain, struktur PDB dari sisi permintaan masih didominasi oleh sektor konsumsi, yaitu mencapai sekitar 63,56 persen pada 2011. Konsumsi rumah tangga menyumbang 54,58 persen, sedangkan konsumsi pemerintah berkontribusi 8,99 persen. Sementara itu, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTDB mengisi sekitar 32,02 persen dari PDB Nasional, sedangkan ekspor dan impor masing-masing 26,33 persen dan 24,92 persen. Selama 2011, masih terjadi selisih positif pada ekspor bersih.

DESKRIPSI PERANAN PERBANKAN DI DAERAH

Studi Nasrudin dan Soesilo (2004) menganalisis pengaruh sektor perbankan di Indonesia dengan data 26 provinsi selama 1983-1999. Penelitian tersebut mengombinasikan antara model pertumbuhan regional dan model integrasi lembaga keuangan dengan mempertimbangkan pengaruh komponen eksternal (dari kondisi daerah). Variabel perbankan digambarkan dari perbandingan antara indikator-indikator perbankan (aset, kredit, dan dana) terhadap PDRB harga konstan. Sedangkan untuk kondisi daerah tergambar dari beberapa tiga determinan, yaitu (1) kelompok sumber daya, baik alam, manusia, maupun keuangan; (2) kebijakan

daerah dan pusat; dan (3) keterbukaan daerah. Studi tersebut menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara aset dan jumlah kantor bank dengan arah positif sedangkan variabel kredit dan DPK memiliki hubungan negatif.

Dalam cakupan regional, rasio kredit terhadap PDRB dan LDR menjadi indikator yang dapat menggambarkan besar kecilnya peranan sektor keuangan dalam perekonomian daerah.

Rasio Kredit terhadap PDRB dan LDR Perbankan Regional

Pada 2010 sebanyak 13 provinsi memiliki rasio kredit terhadap PDRB di atas level nasional, sedangkan 20 provinsi lainnya berada di bawah pencapaian nasional. Pada periode tersebut perbandingan tersebut di Indonesia hanya 28,04 persen. Rasio penyediaan dana dari sektor perbankan terhadap perekonomian DKI mencapai 100,23 persen. Angka tersebut merupakan level tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal tersebut cukup wajar karena sebagian besar aktivitas perekonomian terpusat di Jakarta sehingga ketersediaan dana relatif lebih tinggi. Pada posisi kedua dan ketiga tertinggi adalah Gorontalo dan Maluku masing-masing 75,65 persen dan 49,34 persen.

Tabel 1. Struktur Kredit, Struktur PDB Sisi Penawaran, dan Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia

Sektor	PDB	Kredit	Tenaga Kerja
<i>Tradeable</i>	50.94	24.87	49.12***
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	14.72	5.21	35.86
Pertambangan dan penggalian	11.93	3.99	-
Industri pengolahan	24.28	15.66	13.26
<i>Nontradeable</i>	49.06	75.13	50.88
Listrik, gas dan air bersih	0.75	2.08	1.55***
Konstruksi	10.19	3.43	5.78
Perdagangan, hotel & restoran	13.76	18.43	21.34
Pengangkutan dan komunikasi	6.61	4.33*	4.63
Keuangan, real estat & jasa perusahaan	7.20	46.87**	2.40
Jasa-jasa	10.55		15.18

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, 2012.

*termasuk pergudangan; **jasa dunia usaha, sosial, dan lain-lain; *** termasuk pertambangan dan penggalian; **** angka berkisar di atas 50 persen jika memasukkan pertambangan dan penggalian.

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

Beberapa provinsi yang memiliki rasio kredit terendah adalah Sulawesi Tenggara hanya 6,53 persen dari PDRB. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Riau dan Sumatera Selatan masing-masing 8,56 persen dan 9,19 persen. Papua menjadi provinsi lainnya yang memiliki rasio kredit terhadap PDRB di bawah 10 persen. Selama 2010, rasio kredit terhadap PDRB Papua hanya 9,40 persen. Provinsi-provinsi yang memiliki rasio kredit terhadap PDRB rendah menunjukkan bahwa dangkalnya peranan sektor keuangan. Aktivitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi tersebut cenderung didorong oleh ketersediaan dana dari pemerintah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Beberapa provinsi menunjukkan fenomena unik, di mana rasio kredit terhadap PDRB yang rendah tetapi memiliki LDR tinggi. Kondisi yang demikian terjadi di Sulawesi Tenggara di mana rasio kredit terhadap PDRB hanya 6,53 persen, te-

tapi LDR mencapai 133,85 persen. Secara singkat dapat dikatakan peranan sektor keuangan di provinsi tersebut perlu dioptimal untuk menangkap peluang-peluang usaha. Provinsi lain yang mengalami kondisi serupa adalah Lampung dan NTB. Pada 2010, rasio kredit terhadap PDRB Lampung hanya 17,73 persen, sedangkan LDR mencapai 113,55 persen. Sementara itu, rasio kredit terhadap PDRB NTT pada tahun yang sama adalah 19,27 persen, sedangkan LDRnya mencapai 112,25 persen.

Secara nasional, porsi kredit modal kerja pada 2011 adalah 48,57 persen; kredit konsumsi mencapai 30,32 persen, sedangkan kredit investasi hanya mengambil porsi sekitar 21,01 persen. Sebanyak 26 provinsi memiliki porsi kredit modal kerja yang lebih rendah daripada porsi kredit modal kerja nasional. Artinya, hanya 7 provinsi yang memiliki pangsa kredit modal kerja lebih besar dari porsi nasional. Porsi kredit modal kerja tertinggi

Tabel 2. Rasio Kredit terhadap PDRB dan LDR Perbankan Regional Tahun 2010

Provinsi	Kredit per PDB/LDR	Provinsi	Kredit per PDB/LDR
DKI	100,23/72,15	Banten	24,32/73,35
Gorontalo	75,65/102,06	Sumbar	22,99/96,27
Maluku	49,34/69,86	Jateng	22,29/93,79
Malut	41,63/81,56	Jambi	21,63/87,83
Kepri	38,47/67,93	NAD	20,86/85,78
Bali	36,47/64,26	Kalteng	20,76/99,43
Sulut	35,39/112,84	Jatim	19,94/72,21
Sulsel	35,35/109,52	NTB	19,27/112,25
Sulbar	33,11/166,04	Jabar	18,06/74,70
Bengkulu	31,88/122,60	Lampung	17,73/113,55
Sumut	31,60/80,21	Babel	14,54/43,23
Kalsel	29,35/79,64	Papuabar	13,51/52,95
NTT	28,43/77,16	Kaltim	10,13/65,14
Indonesia	28,04/75,50	Papua	9,40/43,06
DIY	26,70/53,12	Sumsel	9,19/71,65
Kalbar	25,28/66,26	Riau	8,56/78,96
Sulteng	24,71/122,10	Sultenggara	6,53/133,85

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2011) dan Badan Pusat Statistik (2011)

berada di Jatim 59,35 persen sedangkan terendah adalah Kalteng, hanya 22,28 persen (Tabel 2).

Pangsa kredit investasi regional yang lebih rendah dari nasional mencapai 23 provinsi sedangkan yang berada di atas nasional sebanyak 10 provinsi. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan *share* kredit investasi tertinggi, sekitar 40,30 persen sedangkan yang terkecil adalah NAD, hanya 5,77 persen. Pola yang relatif berbeda terjadi pada kredit konsumsi. Merujuk pada data BI (2011) dapat disebutkan bahwa sebanyak 29 provinsi memiliki pangsa kredit konsumsi yang lebih tinggi dari nasional. Hanya 4 provinsi yang memiliki pangsa kredit konsumsi di bawah nasional. Pangsa kredit konsumsi tertinggi berada di NTT, mencapai 67,59 persen dari penyaluran kredit. Sedangkan yang terendah adalah DKI, hanya 21,94 persen (Tabel 3).

Selama 2011, sebanyak 3 provinsi memiliki pangsa kredit modal kerja terhadap total kredit antara 21-30 persen; 17 provinsi memiliki pangsa

pada interval 31-40 persen, sedangkan yang memiliki interval 41-50 persen hanya 13 provinsi. Pada kredit investasi, 9 provinsi memiliki pangsa kredit investasi di bawah 10 persen; 14 provinsi memiliki *share* kredit investasi antara 10-20 persen dan hanya 1 provinsi yang memiliki pangsa 31-40 persen. Pada kredit konsumsi, tidak ditemukan provinsi yang memiliki *share* di bawah 20 persen terhadap total kredit. Sebanyak 4 provinsi memiliki pangsa 21-30 persen terhadap total kredit, 10 provinsi dengan 41-50 persen; 9 provinsi memiliki *share* 51-60 persen. Struktur yang begitu timpang tersebut terlihat pada 2 provinsi yang memiliki pangsa kredit konsumsi mencapai 60-70 persen terhadap total kredit.

Untuk menjelaskan fenomena tingginya LDR perbankan regional pada beberapa provinsi, maka perlu ditampilkan struktur penyaluran kredit menurut penggunaan. Data tersebut akan mengonfirmasi tentang struktur LDR yang tercipta saat ini.

Tabel 3. Deskripsi Kredit Perbankan Menurut Penggunaan

	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
<10	0	9	0
10-20	0	14	0
21-30	3	9	4
31-40	17	1	8
41-50	13	0	10
51-60	0	0	9
61-70	0	0	2
71-80	0	0	0
81-90	0	0	0
91-100	0	0	0
	33	33	33
Tertinggi	Jatim 59,35%	Kalteng 40,30%	NTT 67,59%
Terendah	Kalteng 22,28%	NAD 5,77%	DKI 21,94%
Indonesia	48,57%	21,10%	30,32%
>daripada nasional	7 provinsi	10 provinsi	29 provinsi
<daripada nasional	26 provinsi	23 provinsi	4 provinsi

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2011

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

Sulawesi Barat mencatat LDR tertinggi selama 2011 tetapi struktur penyaluran kredit yang tercipta lebih didominasi oleh kredit konsumsi mencapai 51,18 persen, sedangkan kredit modal kerja dan investasi hanya 31,83 persen dan 16,99 persen. Kondisi yang sama juga terjadi di Sultenggara. Provinsi

ini memiliki LDR hingga 143,85 persen. Kredit konsumsi menyumbang hingga 50,68 persen, sedangkan kredit investasi dan modal kerja berada pada kisaran 39,86 persen dan 9,45 persen. Dari beberapa provinsi yang memiliki LDR di atas 100 persen, hanya Lampung yang memiliki struktur

Tabel 4. Struktur Kredit Menurut Penggunaan Provinsi di Indonesia dan LDR 2011

	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	LDR
Sulbar	31,83	16,99	51,18	163,46
Sultenggara	39,86	9,45	50,68	143,85
Sulteng	44	7,99	48,01	125,49
Lampung	48,64	22,8	28,56	120,45
Bengkulu	38,13	11,46	50,41	119,53
Sulse	38,02	18,22	43,76	114,71
Sulut	32,81	15,44	51,76	112,42
NTB	28,54	9,68	61,77	111,5
Sumbar	39,47	15,18	45,35	106,26
Jateng	55,02	10,73	34,24	96,96
Gorontalo	33,34	9,3	57,37	96,74
Kalteng	22,28	40,3	37,42	96,37
NAD	34,42	5,77	59,81	92,04
Jambi	42,72	16,55	40,73	92,01
Sumut	50,52	21,16	28,32	83,47
Riau	35,54	28,04	36,42	80,74
Malut	34,54	8,92	56,55	80,05
NTT	26,48	5,93	67,59	79,84
Indonesia	48,57	21,1	30,32	79
Jabar	44,05	11,91	44,04	78,64
DKI	51,55	26,51	21,94	76,23
Jatim	59,35	13,06	27,59	75,86
Sumsel	38,87	22,85	38,28	75,26
Banten	32,68	8,79	58,53	74,22
Kalsel	35,27	26,03	38,7	74,21
Maluku	31,63	11,71	56,66	70,48
Kalbar	34,43	24,69	40,88	69,76
Kepri	40,33	21,27	38,4	68,8
Bali	40,3	19,09	40,61	65,33
Kaltim	36,04	29,72	34,24	62,66
DIY	39,2	13,9	46,91	56,47
Papuabar	48,68	9,84	41,48	55,15
Babel	48,75	11,7	39,56	48,75
Papua	43,68	12,47	43,85	45,99

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2011 dan Badan Pusat Statistik, 2011

Keterangan: *Angka yang tebal menunjukkan porsi kredit lebih besar

kredit yang relatif ideal. Pada 2011, perbankan di Lampung mampu menyalurkan hingga 48,64 persen dalam bentuk kredit modal kerja, sebesar 22,8 persen pada kredit investasi, dan kredit konsumsi hanya 28,56 persen (Tabel 4).

Paradoks Struktur Ekonomi dan Penyaluran Kredit di Daerah

Peranan sektor *tradeable* dalam perekonomian sangatlah krusial karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar struktur

Tabel 5. Struktur PDRB, Struktur Ketenagakerjaan dan Struktur Kredit Regional (2011)

Provinsi	PDRB		Tenaga Kerja		Kredit	
	<i>Tradeable</i>	<i>Nontradeable</i>	<i>Tradeable</i>	<i>Nontradeable</i>	<i>Tradeable</i>	<i>Nontradeable</i>
NTT	38,68	61,32	71,97	28,03	1,88	98,12
Maluku	36,12	63,88	57,34	42,66	1,93	98,07
NTB	50,08	49,92	55,61	44,39	1,98	98,02
Sulbar	56,97	42,28	65,73	34,27	2,35	97,65
Malut	49,74	50,26	59,31	40,69	2,42	97,58
Sulsel	47,72	52,28	51,00	49,00	3,25	96,75
Gorontalo	38,14*	61,86*	49,00	51,00	3,92	96,08
Papua	66,03	33,96	73,81	26,19	5,21	94,79
Sulut	32,35	67,65	41,58	58,42	5,24	94,76
Sulteng	50,88	49,12	59,22	40,78	5,54	94,46
Sultenggara	44,79	55,21	54,27	45,73	5,64	94,36
Bali	27,02	72,98	38,98	61,02	6,07	93,93
NAD	45,23*	54,77*	53,04	46,96	6,86	93,14
DIY	29,25*	70,75*	39,49	60,51	7,80	92,20
Bengkulu	45,31	54,69	56,23	43,77	9,91	90,09
Banten	60,81	39,19	40,48	59,52	10,83	89,17
Kaltim	74,28	25,72	44,09	55,91	13,03	86,97
Sumbar	37,98	62,02	48,13	51,87	16,75	83,25
Jabar	56,31	43,69	42,28	57,72	17,75	82,25
Jambi	55,74	44,26	58,62	41,38	18,59	81,41
Kalbar	42,73	57,27	68,14	31,86	19,23	80,77
Babel	58,88*	41,12*	56,58	43,42	19,37	80,63
Sumsel	59,76	40,24	63,04	36,96	19,56	80,44
Kalsel	55,76	44,24	51,94	48,06	19,59	80,41
Jateng	50,90	49,10	53,42	46,58	21,33	78,67
Kepri	60,04	39,96	39,53	60,47	22,11	77,89
Riau	75,83	24,17	52,37	47,63	24,30	75,70
Lampung	52,85	47,15	60,34	39,66	25,88	74,12
DKI	16,20	83,80	16,05	83,95	29,60	70,40
Jatim	44,76	55,25	54,48	45,52	30,39	69,61
Sumut	45,45	54,55	52,60	47,40	35,27	64,73
Kalteng	47,95	52,05	63,05	36,95	39,56	60,44

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

Keterangan: *Data 2010; *Angka yang tebal menunjukkan peranan *tradeable* lebih besar daripada *nontradeable*

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

ekonomi regional masih ditopang oleh sektor *tradeable* (di atas 50 persen dari PDRB). Menurut data olahan dari BPS (2011) terdapat 15 provinsi yang memiliki peranan sektor *tradeable* di atas 50 persen terhadap PDRBnya. Provinsi yang dimaksud tersebut adalah NTB (50,08 persen); Sulbar (56,97 persen); Papua (66,03 persen); Sulteng (50,88 persen); Banten (60,81 persen); Kaltim (74,28 persen); Jabar (56,31 persen); Jambi (55,74 persen); Babel (58,88 persen); Sumsel (59,76 persen); Kalsel (55,76 persen); Jateng (50,90 persen); Kepri (60,04 persen); Riau (75,83 persen); dan Lampung (52,85 persen).

Penyerapan tenaga kerja regional sampai 2011 masih ditopang oleh sektor *tradeable*. Hanya sepuluh provinsi yang peranan sektor *nontradeable*-nya lebih besar dalam menyerap tenaga kerja. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gorontalo (51 persen); Sulut (54,42 persen); Bali (61,02 persen); DIY (60,51 persen); Banten (59,52 persen); Kaltim (55,91 persen); Sumbar (51,87 persen); Jabar (57,72 persen); Kepri (60,47 persen); dan DKI (83,95 persen). Dari sisi struktur kredit yang terbentuk justru lebih didominasi oleh sektor *nontradeable*.

NTT menjadi provinsi dengan kredit *nontradeable* tertinggi mencapai 98,12 persen dari total kredit padahal sebesar 71,97 persen tenaga kerja provinsi tersebut berada pada sektor *tradeable*. Sebanyak 15 provinsi memiliki dominasi struktur penyaluran kredit sektor *nontradeable* di atas 90 persen dari total penyaluran kredit.

KENDALA INTERMEDIASI PERBANKAN

Terdapat beberapa kendala pemenuhan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Sisi internal, misalnya, tergambar dari struktur pendanaan, struktur sumber dana hingga suku bunga. Sementara dari sisi eksternal tergambar dari risiko usaha yang bertalian dengan peluang-peluang pembiayaan. Bagian berikut ini akan menampilkan kendala pembiayaan sektor perbankan dari sisi internal.

Struktur Dana Mahal. Struktur DPK belum banyak berevolusi di mana dominasi simpanan deposito masih dominan mesti mulai menurun. Menurut data BI (2011) simpanan deposito pada Bank Persero per 1990 mencapai 66,20 persen dari

Tabel 6. Struktur Dana Pihak Ketiga Perbankan

	1990	1996	1997	1998	2008	2009	2010	2011
Bank Persero								
Giro	2347	20,32	18,50	12,24	15,38	17,40	20,27	21,24
Tabungan	10,33	27,57	22,23	12,63	39,93	38,80	37,61	40,17
Simpanan Berjangka	66,20	52,12	59,27	75,13	44,69	43,80	42,11	38,59
Bank Pemerintah Daerah								
Giro	67,76	51,36	45,71	44,90	48,79	41,53	33,54	36,93
Tabungan	11,92	26,79	27,63	18,10	26,91	29,44	29,91	29,28
Simpanan Berjangka	20,31	21,85	26,66	37,00	24,29	29,03	36,55	33,79
Bank Swasta Nasional								
Giro	0,00	16,50	20,88	15,53	18,68	18,66	19,13	18,23
Tabungan	100,00	20,76	19,79	13,61	28,23	31,36	31,15	31,68
Simpanan Berjangka	0,00	62,74	59,33	70,86	53,09	49,99	49,72	50,09
Bank Asing dan Bank Campuran								
Giro	n.a	42,30	45,61	40,92	32,17	33,93	35,61	35,97
Tabungan	n.a	0,61	2,39	1,74	8,09	11,36	15,24	14,87
Simpanan Berjangka	n.a.	57,10	52,01	57,34	59,74	54,71	49,15	49,17

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, 2012

total DPK, menurun menjadi 38,59 persen pada 2011. Kontras dengan itu, peranan simpanan deposito pada Bank Pembangunan Daerah/BPD cenderung meningkat, dari 20,31 persen pada 1990 menjadi 33,79 persen. Meski demikian, struktur DPK BPD masih ditopang oleh simpanan giro mencapai 36,93 persen pada 2011. Pada Bank Swasta Nasional/BSN, simpanan deposito menyumbang hingga 50,09 persen terhadap DPK sedangkan tabungan dan giro masing-masing 31,68 persen dan 18,32 persen. Struktur DPK pada Bank Asing dan Bank Campuran. Pada 2011, peranan simpanan deposito sekitar 49,17 persen, sedangkan giro mengisi sekitar 35,97 persen dan porsi simpanan tabungan hanya pada kisaran 14,87 persen (Tabel 6).

Bagian penting lainnya adalah melihat bagaimana struktur simpanan deposito yang terbentuk selama ini. Pada 2011, simpanan deposito 1 bulan mengisi 49,70 persen dari total simpanan deposito. Ada sedikit penurunan porsi tersebut dari tahun sebelumnya, yang mencapai 51,08 persen. Pada posisi kedua adalah simpanan 3 bulan dengan donasi sekitar 30,51 persen. Sementara pada simpanan 6 bulan; 12 bulan; dan 24 bulan masing-masing ber-

kontribusi sekitar 10,11 persen; 7,68 persen; dan 0,45 persen terhadap total simpanan deposito (Tabel 7). Gambaran yang demikian menunjukkan adanya faktor waktu yang menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk menempatkan dananya.

Dari sisi pertumbuhan, selama 2011, pertumbuhan simpanan deposito tertinggi terjadi pada simpanan 24 bulan sebesar 241,68 persen (yoy), disusul simpanan di atas 24 bulan mencapai 108,02 persen (yoy). Simpanan deposito 1 bulan tumbuh 12,28 persen (yoy) sedangkan simpanan deposito 3 bulan dan 6 bulan naik 15,49 persen (yoy) dan 35,87 persen (yoy). Simpanan deposito berdurasi 12 bulan tumbuh paling rendah, hanya 0,73 persen (yoy).

Struktur sumber dana. Data BI (2011) menampilkan beberapa sumber dana perbankan di Indonesia yang terdiri dari enam, yaitu BUMN dan BUMD, swasta, pemerintah daerah, badan usaha bukan keuangan milik negara, badan usaha bukan keuangan milik swasta, dan sektor swasta lainnya. Selama 2011, sumber dana utama perbankan di Indonesia berasal dari sektor swasta lainnya, mencapai 63,63 persen. Angka tersebut sebetulnya turun

Tabel 7. Struktur Simpanan Deposito dan Pertumbuhannya

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 Bulan	61,45	54,69	57,35	54,60	50,00	51,08	49,70
3 Bulan	10,97	13,17	11,34	12,03	16,91	30,49	30,51
6 Bulan	3,14	4,90	4,85	5,62	5,90	8,58	10,11
12 Bulan	4,65	8,41	6,90	6,73	7,99	8,80	7,68
24 Bulan	0,72	1,10	0,66	0,13	0,13	0,15	0,45
Lainnya	19,07	17,73	18,89	20,86	19,05	0,83	1,50
Deposito yang Jatuh Waktu	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,07	0,06
Pertumbuhan (yoy)							
1 Bulan	41,86	-2,69	12,94	17,50	0,01	21,18	12,28
3 Bulan	28,80	31,30	-7,22	30,89	53,48	113,87	15,49
6 Bulan	-36,84	70,26	6,75	42,97	14,61	72,64	35,87
12 Bulan	55,47	97,90	-11,72	20,46	29,70	30,61	0,73
24 Bulan	-19,33	68,42	-35,51	-75,30	9,23	35,87	241,68
Lainnya	41,11	1,67	14,80	36,24	-0,23	-94,83	108,02
Deposito yang Jatuh Waktu	-34,21	56,00	28,21	256,00	-37,08	526,77	-3,58

Sumber: Diolah Bank Indonesia, 2011 (selain 0, 1,3,6,12 dan 24 bulan).

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

dari 2010 mencapai 64,82 persen pada 2010. Struktur yang demikian berpotensi mendongkrak suku bunga simpanan perbankan dan pada gilirannya meningkatkan suku bunga simpanan. Jika dirinci lebih lanjut, sumber dana perorangan mengambil porsi terbesar, mencapai 61,99 persen pada 2010 dan 60,32 persen pada 2011. Selama 2011, jumlah dana sektor lainnya di perbankan nasional tumbuh hingga 16,53 persen (yoy).

Setelah sumber dana swasta lainnya, Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Swasta menyumbang sekitar 23,22 persen pada 2011 dari total dana perbankan. Pencapaian tersebut meningkat dari posisi

2010 mencapai 22,32 persen. Pada bagian lain Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Negara pada 2011 mendonasikan sekitar 3,25 persen terhadap dana perbankan. Dana pemerintah daerah di perbankan nasional pada 2011 sekitar 2,94 persen sedangkan dana swasta berkisar 4,41 persen. Sisanya disumbang oleh BUMN dan BUMD sebesar 2,55 persen (Tabel 8).

Struktur Kepemilikan Rekening Perbankan. Data Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (2011)ewartakan bahwa sebagian besar rekening nasabah berada pada simpanan s/d 100 juta. Jenis simpanan ini mengambil porsi hingga 97,39 persen dari total dana perbankan. Jumlah pemilik rekening ini tum-

Tabel 8. Struktur Dana Perbankan Menurut Pemilik

	Rp Miliar		Share		Pertumbuhan (yoy)
	2010	2011	2010	2011	
Rupiah dan Valas	2.304.875	2.736.415	-	-	18,72
Lembaga Keuangan Lainnya:	146.818	190.480	6,37	6,96	29,74
BUMN dan BUMD	58.850	69.868	2,55	2,55	18,72
Perusahaan Asuransi	46.138	46.258	2,00	1,69	0,26
Lembaga Pembiayaan ¹⁾	3.302	1.759	0,14	0,06	(46,72)
Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	1.419	2.119	0,06	0,08	49,30
Lainnya	7.991	19.732	0,35	0,72	146,92
Swasta	87.968	120.611	3,82	4,41	37,11
Perusahaan Asuransi	25.198	34.514	1,09	1,26	36,97
Perusahaan Pembiayaan	5.803	9.687	0,25	0,35	66,95
Modal Ventura	203	341	0,01	0,01	68,45
Dana Pensiun	23.659	26.632	1,03	0,97	12,57
Perusahaan Sekuritas	7.290	8.009	0,32	0,29	9,86
Perusahaan Reksadana	10.577	15.926	0,46	0,58	50,57
Lainnya	15.239	25.501	0,66	0,93	67,35
Pemerintah Daerah	62.088	80.446	2,69	2,94	29,57
Provinsi	23.345	28.519	1,01	1,04	22,16
Kotamadya/kabupaten	38.743	51.927	1,68	1,90	34,03
Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Negara	87.342	89.002	3,79	3,25	1,90
BUMN	84.567	84.373	3,67	3,08	(0,23)
BUMD	2.775	4.629	0,12	0,17	66,83
Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Swasta	514.538	635.397	22,32	23,22	23,49
Sektor Swasta Lainnya	1.494.089	1.741.091	64,82	63,63	16,53
Yayasan, Badan Sosial, & Org. Kemasyarakatan	53.357	61.567	2,31	2,25	15,39
Koperasi	4.931	3.914	0,21	0,14	(20,61)
Perseorangan	1.428.852	1.650.581	61,99	60,32	15,52
Lainnya	6.950	25.029	0,30	0,91	260,14

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2012

buh 4,2 persen (yoy) selama periode 2010-2011. Pada rekening simpanan >100 juta s/d 200 juta mengambil porsi 1,17 persen dengan pertumbuhan 11,65 persen (yoy); rekening simpanan >200 juta s/d 500 juta menyumbang 0,80 persen dari total simpanan nasabah. Jumlah nilai nominal rekening terbesar adalah di atas 500 juta hingga di atas 5 miliar. Jumlah rekening nilai hanya 0,64 persen. Jika diperhatikan, jumlah rekening di atas 500 juta cenderung meningkat. Pada 2008, jumlah rekening ini baru menyumbang 0,23 persen dari total rekening di perbankan, meningkat menjadi 0,42 persen dan 0,57 persen pada dua tahun berikutnya (Tabel 9).

Meski memiliki pangsa jumlah rekening hanya 0,05 persen dari seluruh rekening nasabah di Indonesia, namun pemilik rekening di atas 5 miliar menyumbang 40,96 persen dari total

simpanan perbankan di Indonesia pada 2011. Kontras dengan itu, dengan porsi hingga 97,39 persen terhadap total rekening nasabah, simpanan di bawah 100 juta hanya menyumbang sekitar 16,49 persen dari total dana perbankan. Jumlah dana untuk rekening di atas 2 miliar hingga 5 miliar dan di atas 1 miliar sampai 2 miliar masing-masing mengisi 9,79 persen dan 8,3 persen dari total simpanan perbankan. Sementara itu, simpanan di atas 500 juta hingga 1 miliar dan di atas 200 juta hingga 500 juta mengisi sekitar 8,99 persen dan 9,45 persen. Sisanya (6,02 persen) diisi oleh pemilik rekening di atas 100 juta hingga 200 juta.

Dalam periode 2010-2011 jumlah rekening nasabah meningkat sekitar 4,42 persen (yoy) turun dari pertumbuhan tahun sebelumnya mencapai 10,49 persen (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening

Tabel 9. Perkembangan Struktur dan Jumlah Rekening Perbankan (Ribu)

	2008	2009	2010	2011
s/d 100 Jt	80.766,25	85.983,77	94.861,16	98.849,58
> 100 Jt s/d 200 Jt	881,59	963,88	1.066,06	1.190,23
> 200 Jt s/d 500 Jt	845,78	657,15	725,27	814,02
> 500 Jt s/d 1 M	0,00	262,55	298,30	345,55
> 1 M s/d 2 M	108,36	12,33	141,57	167,30
> 2 M s/d 5 M	50,34	60,96	72,32	87,41
> 5 M	29,72	34,40	40,19	49,48
Jumlah	82.682,04	87.975,03	97.204,87	10.1503,57
s/d 100 Jt	97,68	97,74	97,59	97,39
> 100 Jt s/d 200 Jt	1,07	1,10	1,10	1,17
> 200 Jt s/d 500 Jt	1,02	0,75	0,75	0,80
> 500 Jt s/d 1 M	0,00	0,30	0,31	0,34
> 1 M s/d 2 M	0,13	0,01	0,15	0,16
> 2 M s/d 5 M	0,06	0,07	0,07	0,09
> 5 M	0,04	0,04	0,04	0,05
s/d 100 Jt	-	6,46	10,32	4,20
> 100 Jt s/d 200 Jt	-	9,33	10,60	11,65
> 200 Jt s/d 500 Jt	-	-22,30	10,37	12,24
> 500 Jt s/d 1 M	-	-	13,62	15,84
> 1 M s/d 2 M	-	-88,62	1047,99	18,17
> 2 M s/d 5 M	-	21,08	18,64	20,87
> 5 M	-	15,76	16,84	23,12
Jumlah	-	6,40	10,49	4,42

Sumber: Diolah dari Lembaga Penjamin Simpanan, 2012

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

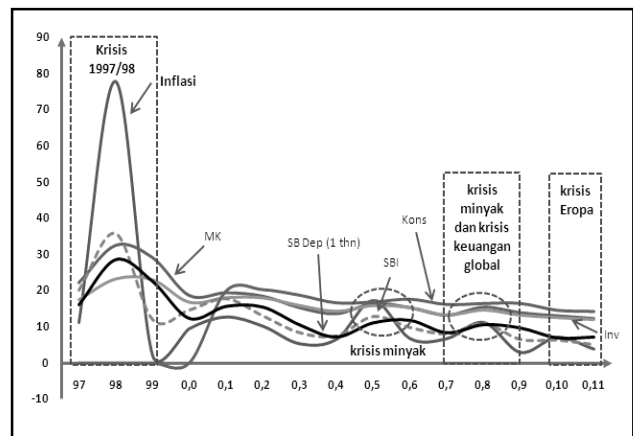
tertinggi berada pada jenis simpanan di atas 5 miliar mencapai 23,12 persen. Jumlah pemilik rekening ini pada 2008 baru 29 ribu naik menjadi 34 ribu pada 2009. Dua tahun berikutnya, jumlah rekening di atas 5 miliar masing-masing menjadi 40 ribu dan 49 ribu.

Pertumbuhan pemilik rekening tertinggi kedua adalah pada jenis simpanan di atas 2 miliar hingga 5 miliar. Selama 2011 pemilik rekening ini tumbuh hingga 20,87 persen (yoy). Sementara itu, jumlah rekening dengan nominal di atas 1 miliar hingga 2 miliar naik 18,17 persen (yoy). Pemilik rekening dengan nominal di atas 500 juta hingga 1 miliar naik 15,84 persen (yoy). Selama 2011, dua kategori rekening yang memiliki pertumbuhan terendah adalah rekening dengan nominal di atas 200 juta hingga 500 juta dan di bawah 100 juta dan 200 juta, masing-masing tumbuh 11,65 persen dan 4,2 persen dari tahun sebelumnya.

Tingginya Suku Bunga. Persoalan tingginya suku bunga perbankan di Indonesia bukan terjadi akhir-akhir ini. Fenomena ini telah berkembang sejak lama. Sayangnya belum terdapat upaya signifikan yang dilakukan oleh regulator. Dalam kerangka teori disebutkan bahwa tingginya suku bunga di Indonesia sejalan dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi. Lebih rumit lagi, pengelolaan inflasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. BI berargumen bahwa keberadaannya hanya mengurus inflasi dari sisi permintaan (*pull demand inflation*), padahal argumen tersebut tidak dinyatakan di dalam undang-undang. Sementara itu, inflasi dari sisi penawaran (*cost push inflation*) sebagai sumber inflasi utama di Indonesia disandarkan kepada pemerintah. Sampai saat ini pemerintah masih kewalahan dalam mengendalikan inflasi ini terutama karena faktor ketersediaan bahan makanan, energi, dan kualitas infrastruktur.

Ketersediaan bahan makanan terutama bermasalah pada beberapa pahan strategis seperti beras maupun cabai. Sementara itu, ketersediaan energi nasional sudah tidak mampu mencukupi ke-

butuhan yang terus meningkat. Program penggunaan energi alternatif hanya bergerak pada kertas kerja karena dinilai tidak memberikan rente besar layaknya pada pengelolaan minyak. Pemerintah baru cemas ketika terjadi lonjakan harga emas hitam (minyak). Blanchard & Gali (2007) kenaikan harga minyak bukan hanya mendorong kontraksi ekonomi, pengangguran tinggi, tetapi juga inflasi tinggi. Hamilton (1983) menekankan bahwa pengaruh fluktuasi harga minyak berdampak pada lonjakan biaya produksi, dorongan inflasi, maupun ketidakpastian investasi, dan bermuara pada penurunan performa perekonomian.



Grafik 4. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Domestik

Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2011

Grafik 4 menunjukkan pergerakan suku bunga domestik pada berbagai kondisi, terutama pada saat krisis. Krisis 1997, 2005, dan 2008 menunjukkan bagaimana lonjakan suku bunga karena adanya dorongan dari sisi eksternal. Suku bunga relatif bergerak ke atas saat krisis keuangan global dan krisis Eropa. Kondisi suku bunga perbankan di Indonesia relatif sensitif terhadap peningkatan suku bunga kebijakan tetapi rigid saat koreksi ke bawah suku bunga kebijakan. Pada 2009, misalnya, sebagai dampak dari penurunan inflasi (dari 11,06 persen menjadi 2,78 persen), bank sentral

mengoreksi suku bunga acuan (suku bunga SBI) menjadi 6,46 persen. Suku bunga simpanan deposito 1 tahun turun) turun menjadi 9,55 persen dari 10,43 persen. Sayangnya, koreksi tersebut tidak signifikan bertransmisi ke suku bunga pinjaman. Suku bunga kredit modal kerja turun dari 15,2 persen menjadi 13,7 persen sedangkan suku bunga investasi turun menjadi 13 persen dari 14,4 persen. Suku bunga kredit konsumsi bertahan pada level 16,4 persen.

Dalam perbandingan dengan negara lain, suku bunga Indonesia jauh lebih tinggi, baik untuk suku bunga nominal maupun suku bunga riil. Pada 2010, misalnya, suku bunga deposito 1 tahun di China hanya 2,33 persen, Korea Selatan 3,86 persen, Malaysia dan Filipina masing-masing 2,07 persen. Beberapa negara lain, seperti Singapura dan Thailand, menetapkan suku bunga simpanan deposito 12 bulan di bawah 2 persen. Hanya Indonesia, India, dan Vietnam yang suku bunga depositonya di atas 5 persen. Dengan biaya dana yang begitu tinggi, tidak heran jika suku bunga pinjaman di Indonesia berada di atas 13 persen. Level tersebut sedikit di atas Vietnam sebesar 13,14 persen. Perbandingan dengan negara lain misalnya, China 5,81 persen; Korea Selatan 5,51 persen; Malaysia 5,02 persen; Singapura 7,67 persen; dan Thailand 5,94 persen.

Spread suku bunga di Indonesia per 2010 mencapai 5,37 persen, merupakan level tertinggi di antara negara yang diamati. *Spread* terendah adalah Vietnam 1,64 persen meski suku bunga simpanan dan pinjaman relatif tinggi. *Spread* suku bunga Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Vietnam, pada level 1,65 persen. *Spread* suku bunga di China hanya 3,48 persen; Malaysia 2,95 persen; Singapura dan Thailand masing-masing 4,93 persen dan 4,39 persen (Tabel 10).

Lima negara memiliki suku bunga deposito riil negatif pada 2010. Suku bunga deposito riil di China adalah -0,97 persen; India -3,09 persen; Filipina -1,73 persen; Singapura dan Thailand masing-masing -2,35 persen dan -1,75 persen. Suku bunga deposito riil tertinggi berada di Vietnam dan Indonesia masing-masing 10,6 persen dan 2,78 persen. Suku bunga kredit riil di Indonesia per 2010 mencapai 8,15 persen, tertinggi setelah Vietnam yang mencapai 12,24 persen. China, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memiliki suku bunga kredit riil di bawah 4 persen.

Tingkat Konsentrasi dan Potensi Pasar Oligopoli. Kondisi pasar yang terkonsentrasi cenderung menciptakan permasalahan terutama pada sisi tingkat persaingan antar pelaku. Dalam konsep ekonomi mikro, struktur pasar yang demikian juga menyebabkan munculnya biaya sosial berupa *dead*

Tabel 10. Perkembangan Suku Bunga Beberapa Negara

	SBD		SBK		Inflasi		Spread		SB		SB	
	12 Bulan		12 Bulan						Rill Deposito		Rill Kredit	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
China	2,25	2,33	5,31	5,81	0,7	3,3	3,06	3,48	1,55	-0,97	4,61	2,51
Korea Selatan	3,48	3,86	5,65	5,51	2,8	2,9	2,17	1,65	0,68	0,96	2,85	2,61
India	6,75	5,91	12,91	n,a	12,4	9	6,16	-	-5,65	-3,09	0,51	-
Indonesia	9,55	7,88	14,5	13,25	4,8	5,1	4,95	5,37	4,75	2,78	9,7	8,15
Malaysia	2,5	2,07	5,08	5,02	0,6	1,7	2,58	2,95	1,9	0,37	4,48	3,32
Filipina	2,5	2,07	8,57	7,67	3,2	3,8	6,07	5,6	-0,7	-1,73	5,37	3,87
Singapura	0,53	0,45	5,38	5,38	0,6	2,8	4,85	4,93	-0,07	-2,35	4,78	2,58
Thailand	0,83	1,55	5,96	5,94	-0,9	3,3	5,13	4,39	1,73	-1,75	6,86	2,64
Vietnam	10,37	11,5	10,07	13,14	5,9	0,9	-0,3	1,64	4,47	10,6	4,17	12,24

Sumber: Diolah dari Asian Development Bank, 2011

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

weight loss (keuntungan yang hilang). Selain itu, tingkat konsentrasi pelaku pada gilirannya memengaruhi penentuan harga di pasar (*market power*).

Merujuk pada konsep konsentrasi industri dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi indeks konsentrasi, maka tingkat persaingannya semakin rendah. Tingkat konsentrasi pada industri sekaligus menggambarkan kekuatan suatu perusahaan/beberapa perusahaan dalam memengaruhi harga pasar. Untuk melihat konsentrasi perbankan di Indonesia dapat merujuk pada tiga indikator yaitu Aset, Modal, DPK, dan Kredit.

Bain (dalam Naylah 2010) menjelaskan empat kategori suatu industri dikatakan oligopoli, yaitu (i) Tipe I (sangat tinggi) jika tiga perusahaan terbesar menguasai sekitar 87 persen dari total penawaran output ke suatu pasar atau delapan perusahaan terbesar menguasai 99 persen total penawaran output; (ii) Tipe II (tinggi) empat perusahaan terbesar menguasai 65 persen-75 persen penawaran output, delapan perusahaan terbesar menguasai 85 persen-90 persen penawaran output atau 20 per-

usaha terbesar menguasai 95 persen penawaran output; (iii) Tipe III (moderat) empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 50 persen-65 persen penawaran output atau 20 perusahaan terbesar menguasai 95 persen penawaran output; dan (iv) Tipe IV (rendah) empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 38 persen-50 persen penawaran output, 8 perusahaan terbesar menguasai sekitar 65 persen atau 20 perusahaan terbesar menguasai sekitar 70 persen penawaran output.

Pada 2011, empat bank yang menguasai DPK, kredit, dan aset perbankan terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia/BRI, Bank Mandiri, Bank Central Asia/BCA, dan Bank Negara Indonesia/BNI. Pada pangsa kredit, keempat bank tersebut menguasai 42,15 persen sedangkan untuk 10 bank menyumbang hingga 64,04 persen dari total DPK. Pada penghimpunan DPK, keempat bank tersebut menguasai 48,26 persen. Aset keempat bank terbesar di Indonesia menguasai hingga 45,56 persen dari total aset perbankan (Tabel 11). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar perbankan di Indonesia termasuk dalam kategori oligopoli tipe IV.

Tabel 11. Pangsa 10 Besar Bank di Indonesia pada Kredit, DPK, dan Aset Tahun 2011

	<i>Share Kredit (%)</i>		<i>Share DPK (%)</i>		<i>Share Aset (%)</i>
BRI	12,9	Mandiri	13,65	Mandiri	13,5
Mandiri	12,37	BRI	13,36	BRI	12,49
BCA	9,07	BCA	11,61	BCA	10,43
BNI	7,15	BNI	8,08	BNI	7,92
Total 4 bank	41,49	Total 4 bank	46,7	Total 4 bank	44,34
CIMB Niaga	5,55	CIMB Niaga	4,73	CIMB Niaga	4,5
Danamon	3,96	Danamon	3,18	Danamon	3,48
Pan	3,12	Pan	3,07	Pan	3,26
Permata	3,05	Permata	2,98	Permata	2,78
BTN	2,89	BII	2,53	BII	2,5
BII	2,85	BTN	2,23	BTN	2,44
Total 10 bank	11,91	Total 10 bank	65,42	Total 10 bank	63,3

Sumber: Diolah dari BI, 2012

PENGUATAN PERAN PERBANKAN

Penguatan peran perbankan menjadi sangat penting untuk memastikan berjalannya fungsi intermediasi keuangan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan:

Perbaiki iklim investasi dan manfaatkan momentum. Momentum perekonomian nasional saat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Momentum tersebut misalnya tergambar dari aliran *capital inflow* ke Indonesia sejak memburuknya kinerja Amerika Serikat/AS dan Uni Eropa/EU. Indonesia pun sudah mencapai level *investment grade* yang telah lama diimpikan. Dalam catatan BI, *capital inflow* diproyeksi USD19 miliar pada 2012, naik dari USD18 miliar dari tahun sebelumnya. Untuk memanfaatkan momentum tersebut serta upaya menggerakkan dana portofolio ke sektor riil memerlukan usaha ekstra.

Dalam cakupan global, terdapat beberapa masalah utama dalam pengembangan bisnis dan peluang investasi di Indonesia. Sebagian dari problem tersebut bersumber dari sisi mikro. *World Economic Forum/WEF* (2011) merumuskan lima masalah utama di Indonesia, yaitu korupsi (15,4 persen); inefisiensi birokrasi pemerintah (14,3 persen); minimnya keberadaan infrastruktur (9,5 persen), instabilitas politik (7,4 persen), dan akses lembaga keuangan (7,2 persen). Pada indikator akses lembaga keuangan beberapa peringkat Indonesia adalah kemudahan akses pinjaman (16); keberadaan modal ventura (17); keberadaan jasa keuangan (57); kesehatan bank (112); kemampuan membayar jasa keuangan (54); pembiayaan melalui pasar saham lokal (25); peraturan perdagangan saham (56); dan indeks hak hukum (105).

World Bank (2011) juga merinci kondisi biaya memulai bisnis di Indonesia, yaitu (i) jumlah prosedur memulai bisnis mencapai 8 prosedur, rata-rata OECD dan rata-rata Asia Pasifik 5 prosedur dan 7 prosedur, (ii) jumlah hari memulai bisnis di Indonesia mencapai 45 hari. Rata-rata

OECD 12 hari dan rata-rata Asia Timur dan Pasifik 37 hari, dan (iii) biaya memulai bisnis di Indonesia adalah 17,9 persen dari pendapatan per kapita; rata-rata OECD adalah 4,7 persen dan rata-rata Asia Pasifik adalah 22,7 persen.

Menekan Suku Bunga. Tingginya suku bunga di Indonesia berhubungan dengan tingkat inflasi yang tinggi (*fisher effect*). Sumber inflasi di Indonesia lebih didominasi oleh permasalahan dari sisi penawaran (*cost push inflation*) (Atmaja, 1999). Inflasi dari sisi penawaran bersumber dari masalah ketersediaan bahan makanan, masalah distribusi (ketersediaan dan kualitas infrastruktur) dan masalah energi. Untuk itu perbaikan kinerja inflasi sisi penawaran menjadi sangat krusial. Terkait dengan penanganan masalah inflasi, memerlukan kolaborasi antara BI dan pemerintah. BI berupaya menekan inflasi dari sisi permintaan, sedangkan pemerintah dari sisi penawaran. BI juga secara harfiah telah membantu pemerintah dalam penanganan inflasi sisi penawaran di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID.

Perbaiki Konsentrasi Struktur Perbankan. Meskipun level oligopoli dalam sektor perbankan relatif rendah, tetapi hal itu berperan menyulitkan upaya menurunkan tingkat suku bunga. Bank Indonesia perlu mendorong merger di antara bank-bank menengah dan kecil agar persaingan perbankan menjadi lebih kompetitif. Di luar itu, efisiensi perbankan juga mesti ditingkatkan karena sampai saat ini jauh dari kondisi ideal. Rata-rata efisiensi perbankan di Indonesia masih rendah, berkisar pada angka 85% bila memakai indikator BOPO (biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional). Bandingkan dengan perbankan di Asean yang rata-rata BOPO-nya pada kisaran 40-60% saja. Dengan situasi efisiensi yang rendah sulit diharapkan perbankan menekan tingkat suku bunga.

Pemihakan terhadap sektor riil. Salah satu masalah serius bangsa ini adalah kesulitan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara meyakinkan. Hal ini sebagian bermula dari

Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

rendahnya sokongan terhadap sektor pertanian dan industri yang selama ini menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Oleh karena itu, diharapkan fungsi intermediasi perbankan di masa depan diarahkan ke kedua sektor tersebut. Situasi seperti pada awal 2000-an harus diupayakan tercapai kembali, yakni ketika total kredit perbankan yang mengucur ke sektor pertanian dan industri hampir mencapai 50%. Sekurangnya, saat ini kedua sektor itu membutuhkan sokongan sekitar 35-40% dari total kredit untuk membantu mengurai persoalan kemiskinan dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, A. 1999. Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1): 54-67.
- Agung, J., Kusmiarso, B., Pramono, B., Hutapea, E.G., Prasmuko, A., & Prastowo, N.J. 2001. *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis: Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia.
- Apergis, N. & Filippidis, I. & Economidou, C. 2007. Financial Deepening and Economic Growth Linkages: A Panel Data Analysis. *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv)*, 143(1): 179-198.
- Asian Development Bank. 2011. *Key Indicator for Asia dan the Pasifik 2011*. <http://www.adb.org/statistics>. Diakses 04 Maret 2012.
- Bank Indonesia. 2012. *Kajian Stabilitas Keuangan*. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Grup Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia. No.18 (Maret).
- Bank Indonesia. 2011. *Statistik Perbankan Indonesia*. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. Jakarta.
- Blanchard, O. J. & Gali, J. 2007. *The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from the 1970s?* http://www.crei.cat/people/gali/pdf_files/bgoil07wp.pdf (Diakses tanggal 04 Maret 2012).
- Bonin, J. & Wachtel, P. 2003. Financial Sector Development in Transition Economies: Lessons from the First Decade. *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 12 (February): 1-66.
- Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. 2008. Finance and Economic Opportunity. *World Bank Policy Research Working Paper No. 4468*, January 1st
- Hamilton, J.D. 1983. Oil and the Macroeconomy since World War II. *The Journal of Political Economy*, 91(2): 228-248.
- Juoro, U. 1993. Financial Liberalization in Indonesia; Interest Rate, Money Market Instruments, and Bank Supervision. *ASEAN Economic Bulletin*, 9(3): 323-337.
- King, R.G. 2012. Monetary Policy Response to Oil Price Shocks. *Journal of Money, Credit and Banking*, 44(1): 53-101.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2012. *Pertumbuhan Simpanan: Bank Umum Posisi Desember 2011*. Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. 1999. A New Database on Financial Development and Structure. *Financial Sector Discussion Paper No. 2*. The World Bank.
- Levine, R. & King, R.G. 1993. Finance and Growth, Schumpeter Might be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3/99): 717-737.
- Nasrudin, R. & Soesilo, I.N. 2004. Perkembangan Perbankan Indonesia: Analisis Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia dan Penyebab-penyebabnya dengan Data Panel 1983-1999. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, IV(01): 137-155.
- World Bank. 2012. *Cost of Doing Business*. <http://www.doingbusiness.org/>. (Diakses 04 April 2012).
- World Economic Forum. 2011. *The Global Competitiveness Report 2011-2012*. Geneva, Swizerland. Dalam <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness>. (Diakses 18 April 2012).